

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upacara adat merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai wujud ekspresi kepercayaan, nilai-nilai moral, dan hubungan sosial, upacara adat menjadi media untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Dalam budaya Indonesia, upacara adat juga menjadi simbol identitas yang mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Tradisi ini sering kali dilestarikan melalui generasi ke generasi sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat.

Menurut Suhamihardja (1997: 29), suku bangsa Toraja dikenal sebagai suku yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Setiap pekerjaan harus dilaksanakan menurut adat. Melanggar adat istiadat merupakan hal yang tabu dan masyarakat akan memandang rendah terhadap orang yang tidak mengikuti adat, apalagi dalam upacara kematian, upacara adat tidak boleh ditinggalkan. Pada umumnya upacara adat itu dilakukan dengan besar-besaran karena anggapan masyarakat Toraja apabila upacara itu diadakan semakin meriah, semakin banyak harta dikorbankan, semakin baik dan merupakan gengsi sosial bagi orang yang bersangkutan. Kebanyakan yang melakukan hal itu adalah golongan-golongan bangsawan dan golongan menengah.

Upacara adat *Rambu Solo* merupakan salah satu tradisi paling penting dalam kehidupan masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara *Rambu Solo* merupakan prosesi penghormatan terakhir kepada leluhur, *Rambu Solo* memiliki dimensi spiritual, sosial, dan budaya yang sangat kental. Tradisi ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan kehidupan seseorang yang telah meninggal, tetapi juga memperkuat ikatan komunitas dan menegaskan nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pelaksanaan upacara *Rambu Solo* meliputi serangkaian ritual yang kompleks dan memerlukan persiapan yang panjang. Mulai dari pengumpulan sumber daya ekonomi untuk menyelenggarakan upacara, koordinasi antara anggota keluarga yang tersebar di berbagai daerah, hingga mendidik adat seperti penyembelihan kerbau yang dianggap sebagai simbol pengantar arwah menuju Puya (alam akhirat). Proses ini tidak hanya menuntut waktu yang cukup lama, tetapi juga biaya yang besar.

Seiring perkembangan zaman dengan berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah membawa tantangan tersendiri terhadap pelaksanaan tradisi ini, termasuk perubahan waktu pelaksanaannya. Urbanisasi dan modernisasi telah mengubah pola hidup masyarakat Toraja, terutama mereka yang tinggal di perkotaan atau merantau ke luar daerah. Kesibukan kerja, keterbatasan waktu, dan tuntutan kehidupan modern sering kali membuat masyarakat harus mempercepat pelaksanaan upacara *Rambu Solo*. Selain itu, faktor ekonomi berperan besar dalam perubahan waktu pelaksanaan upacara. Biaya tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan *Rambu Solo*, seperti penyembelihan kerbau dalam jumlah banyak, sering kali membuat keluarga harus menunggu waktu yang lebih lama hingga mereka mampu secara finansial. Beberapa keluarga bahkan memilih untuk menggabungkan upacara dengan perayaan lain demi efisiensi. Menurut Hasbi (2016: 75) terdapat perbedaan dalam waktu pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo* dulu dengan masa kini. Dulu upacara *Rambu Solo*

dilaksanakan setelah pukul 12 siang. Namun, pada masa kini upacara tersebut dapat dimulai pada pagi hingga sore.

Perubahan waktu pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo* membawa dampak yang beragam. Di satu sisi, penyesuaian waktu dianggap sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap tantangan zaman tanpa harus meninggalkan tradisi sepenuhnya. Namun di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan berkurangnya makna spiritual dan filosofis dari *Rambu Solo*. Para tokoh adat dan masyarakat tradisional sering kali berasumsi bahwa perubahan waktu dapat menurunkan kesan khidmat, keaslian, dan nilai sakral dari upacara tersebut (Hasbi, 2016: 75-76).

Selain menjadi sarana penghormatan terakhir, upacara adat *Rambu Solo* juga berfungsi sebagai ajang redistribusi kekayaan di dalam masyarakat Toraja. Hewan-hewan yang dikorbankan, khususnya kerbau dan babi, dibagikan kepada kerabat serta masyarakat sekitar. Hal ini tidak hanya menegaskan status sosial keluarga penyelenggara, tetapi juga memperkuat solidaritas antarwarga. Dengan pembagian hasil korban ini, tercipta keseimbangan sosial sehingga tidak ada pihak yang merasa tersisih dalam tatanan adat Toraja. Lebih dari itu, praktik ini juga mengandung pesan moral bahwa kekayaan tidak boleh hanya dinikmati secara pribadi, melainkan harus dibagikan untuk menjaga harmoni bersama. Dalam perspektif antropologi, hal ini merupakan bentuk "ekonomi moral" yang menempatkan hubungan sosial di atas kepentingan individual (Bigalke, 2005: 114).

Di samping aspek sosial, upacara *Rambu Solo* juga memiliki dimensi ekonomi yang cukup signifikan. Prosesi besar-besaran yang dilakukan memunculkan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar, misalnya meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, pengrajin rumah adat (tongkonan), hingga penyedia jasa transportasi dan konsumsi. Aktivitas ini memberikan pemasukan tambahan bagi penduduk lokal sehingga roda perekonomian desa berjalan lebih dinamis. Tidak jarang, pelaksanaan *Rambu Solo* juga menarik wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menyaksikan keunikan budaya Toraja, sehingga membuka peluang ekonomi baru di sektor pariwisata. Dengan demikian, meskipun upacara ini menuntut biaya yang tinggi, keberadaannya sekaligus menjadi penopang ekonomi masyarakat sekitar dan aset budaya yang bernilai ekonomi (Nooy-Palm, 1986: 231).

Namun demikian, modernisasi dan perubahan pola pikir generasi muda Toraja mulai menimbulkan pergeseran persepsi terhadap upacara *Rambu Solo*. Sebagian generasi muda menganggap bahwa upacara ini terlalu membebani dari sisi finansial dan tidak selalu relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. Akan tetapi, masih ada pula yang memandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang menjadi identitas Toraja di mata dunia. Pergeseran ini memperlihatkan adanya dinamika antara kebutuhan praktis masyarakat modern dengan kewajiban adat yang diwariskan leluhur. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan pandangan ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan antargenerasi. Namun di sisi lain, dialog yang muncul justru bisa menjadi peluang untuk merevitalisasi tradisi agar tetap relevan dengan kehidupan masa kini (Waterson, 2009: 67).

Upaya pelestarian *Rambu Solo* kini banyak dilakukan baik oleh masyarakat adat, pemerintah daerah, maupun lembaga kebudayaan. Strategi yang ditempuh antara lain melalui dokumentasi, festival budaya, dan pengenalan nilai-nilai adat kepada generasi

muda sejak dini. Program pendidikan adat di sekolah, serta pelibatan pemuda dalam kegiatan budaya, menjadi cara penting untuk memastikan keberlanjutan tradisi. Pemerintah daerah Toraja bahkan telah menjadikan *Rambu Solo* sebagai salah satu atraksi wisata budaya unggulan, namun tetap menekankan pada aspek otentisitas agar tidak kehilangan nilai sakralnya. Dengan demikian, *Rambu Solo* diharapkan tidak hanya bertahan sebagai tontonan pariwisata, tetapi tetap terjaga makna filosofis dan spiritualnya di tengah arus globalisasi (Kusumawati, 2018: 48).

Penelitian tentang degradasi ritual adat *Rambu Solo* di Kabupaten Tana Toraja penting dilakukan baik secara teoritis maupun empiris. Secara teoritis, kajian ini berupaya memahami perubahan nilai dan makna budaya masyarakat Toraja melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai modern dan kapitalistik dapat mendominasi serta menggeser nilai-nilai tradisional dalam praktik kebudayaan. Sementara secara empiris, fenomena degradasi terlihat nyata dari penyederhanaan tahapan ritual, berkurangnya partisipasi masyarakat, hingga meningkatnya unsur komersialisasi dalam pelaksanaan *Rambu Solo*. Pergeseran orientasi dari nilai religius dan sosial menuju nilai material menunjukkan adanya transformasi budaya yang signifikan, sehingga penelitian ini penting untuk mengungkap faktor penyebab dan dampaknya terhadap keberlanjutan nilai-nilai adat masyarakat Toraja.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Definisi dan pemahaman ritual *Rambu Solo*.
2. Tahapan ritual *Rambu Solo* yang mengalami penyederhanaan.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo*.
4. Dampak terjadinya degradasi dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo*.
5. Komersialisasi ritual sebagai atraksi budaya.
6. Kurangnya regenerasi pengetahuan adat.
7. Konflik nilai antara adat dan ajaran agama modern.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang memiliki cakupan yang sangat luas. Peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini akan membatasi kajian pada faktor dan dampak terjadinya degradasi upacara *Rambu Solo*.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya degradasi dalam upacara adat *Rambu Solo* di Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimanakah dampak terjadinya degradasi dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo* di Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan bentuk upaya dalam mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi dalam upacara adat *Rambu Solo* di Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.
2. Menganalisis dampak terjadinya degradasi dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo* di Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1.6.1 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi budaya dalam merancang program-program yang mendukung pelestarian budaya Toraja, khususnya dalam konteks upacara adat.
- b) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai degradasi dalam pelaksanaan upacara *Rambu Solo*, sehingga mereka dapat memahami makna dari tradisi yang dijalankan.

#### 1.6.2 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi, sosiologi, dan studi budaya.
- b) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang upacara adat *Rambu Solo* atau topik terkait lainnya dalam konteks budaya Toraja atau masyarakat adat lainnya.
- c) Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan perubahan budaya dan kondisi terhadap modernisasi masyarakat, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktik-praktik tradisional.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori adalah seperangkat konsep, prinsip, dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar berpikir dalam suatu penelitian. Landasan teori berfungsi untuk menjelaskan, membatasi, dan mengarahkan penelitian agar sesuai dengan konteks ilmiah yang relevan. Melalui landasan teori, peneliti dapat menafsirkan hubungan antar variabel, menjelaskan fenomena yang diamati, serta memperkuat argumentasi penelitian dengan dasar ilmiah yang logis (Sugiyono, 2019: 97). Selain itu, landasan teori juga membantu peneliti menghindari kesalahan konseptual dengan mengacu pada teori-teori yang telah teruji. Dengan demikian, landasan teori bukan hanya sekadar kumpulan pendapat ahli, tetapi juga fondasi analisis yang memberikan arah dan makna terhadap hasil penelitian (Arikunto, 2013: 110).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hegemoni karena teori ini mampu menjelaskan bagaimana dominasi nilai dan ideologi modern memengaruhi kesadaran masyarakat Toraja, sehingga terjadi pergeseran makna dan praktik dalam ritual *Rambu Solo*. Melalui perspektif Antonio Gramsci, degradasi ritual ini dipahami sebagai bentuk penerimaan ideologi dominan yang bekerja secara halus melalui konsensus sosial, bukan paksaan. Teori ini juga membantu mengungkap bagaimana kekuatan ekonomi, agama, dan modernisasi berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat hingga menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional, spiritual, dan sosial dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo* di Kabupaten Tana Toraja.

##### **2.1.1 Teori Hegemoni**

Antonio Francesco Gramsci merupakan seorang jurnalis, aktivis, dan pemimpin Partai Komunis Italia atau Partito Comunista d'Italia (PCd'I) yang lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di Ales, Sardinia. Pada bulan April 1924, ia terpilih sebagai salah satu anggota parlemen mewakili golongan sosialis. Meskipun begitu, Gramsci tetap berada dalam posisi yang berbahaya, sebab rezim fasis pada saat itu mulai menunjukkan sikap otoriter dan kediktatorannya (Martin, 2023). Akhirnya, pada tanggal 8 November 1926, Gramsci ditangkap oleh pihak berwenang dan dipenjarakan. Ia dijatuhi hukuman selama 20 tahun, 4 bulan, 15 hari (Siswati, 2017).

Di dalam penjara, Gramsci menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk catatan harian. Gramsci meninggal pada tanggal 27 April 1937 karena pendarahan otak. Selama sebelas tahun mendekam di penjara, Gramsci telah menghasilkan lebih dari 30 catatan yang terdiri atas 3000 halaman. Catatan-catatan tersebut kemudian diterbitkan dengan judul *The Prisons Notebook* (Siswati, 2017).

Salah satu dari sekian banyak pemikiran Gramsci yang tertuang dalam catatan hariannya adalah teori hegemoni. Dalam bahasa Yunani Kuno, hegemoni (*eugemonia*), merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan dominasi posisi yang dimiliki oleh negara-negara kota (*city-states*), misalnya yang dilakukan negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto dalam Patria & Arief, 1999).

Konsep hegemoni pertama kali diperkenalkan oleh seorang Marxis Rusia, Plekhanov, pada tahun 1880 (Bockock dalam Patria & Arief, 1999). Menurut

Plekhanov, hegemoni merupakan bentuk kepemimpinan yang diciptakan oleh kaum proletar dan kelompok lain di luar kaum proletar, seperti petani, intelektual, dan borjuis, sebagai bagian dari strategi untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar. Gramsci, melalui catatan hariannya, memperkenalkan konsep hegemoni sebagai kekuasaan yang didapatkan sebuah kelas sosial melalui konsensus dan bukan melalui kekerasan (Patria & Arief, 1999).

Teori hegemoni Antonio Gramsci berbasis pada filsafat praksis dan materialisme historis. Materialisme historis meyakini bahwa suatu materi tidak pernah bebas dari ruang dan waktu, yang mempengaruhi dan membentuk segala sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu. Materialisme historis menolak metafisika dan menganggap penting untuk bertindak/bekerja/praxis untuk mencapai tujuan-tujuannya, serta menganggap manusia merupakan bagian dari rangkaian yang terpisah-pisah. Infrastruktur menentukan keberadaan superstruktur, dan superstruktur beroperasi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi/infrastruktur. Gramsci menggaris bawahi pentingnya ideologi. Ia tidak menganggap ideologi sebagai ilusi dari perjuangan sosial tetapi ideologi memiliki pengaruh yang sangat signifikan sebagai kekuatan material maupun politik. Ideologi memberikan kekuatan bagi manusia untuk menyadari ketertindasan mereka dan mengarahkan tindakan mereka untuk melenyapkan penindasan tersebut (Tami, 2021: 32).

Teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui dominasi fisik, tetapi juga melalui dominasi ideologis dan budaya. Hegemoni menurut Gramsci adalah kemampuan kelas dominan untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat melalui konsensus, bukan sekadar kekuatan koersif (Gramsci, 1971: 12). Dalam proses hegemonik, budaya dominan mempengaruhi dan membentuk nilai, norma, dan praktik sosial sehingga diterima sebagai "alami" atau "wajar" oleh masyarakat luas (Simon, 1991: 5). Dalam konteks ini, budaya lokal atau tradisional yang tidak sejalan dengan nilai hegemonik dapat mengalami delegitimasi, bahkan berujung pada degradasi atau penghapusan. Hegemoni tidak sekadar dominasi melalui kekuatan, melainkan dominasi yang dibalut dengan persetujuan (*consent*). Misalnya, ketika masyarakat menganggap bahwa suatu tatanan sosial, aturan, atau kebijakan adalah sesuatu yang wajar dan alamiah, padahal sejatinya merupakan hasil konstruksi kepentingan kelompok dominan. Inilah yang membuat hegemoni jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan paksaan semata, karena ia bekerja dalam kesadaran masyarakat, bukan hanya dalam ranah fisik (Simon, 2001: 25).

Untuk menjelaskan mekanisme kerja hegemoni, Gramsci membedakan antara masyarakat politik dan masyarakat sipil. Masyarakat politik menggunakan instrumen koersif negara—seperti hukum, polisi, dan militer—untuk menjaga ketertiban. Sedangkan masyarakat sipil berperan lebih halus, melalui pendidikan, agama, media, seni, hingga keluarga. Di ruang inilah ideologi dominan diproduksi, disebarkan, dan dinormalisasi. Karena itu, masyarakat sipil adalah arena utama dalam pertarungan ideologis antara kelas dominan dan kelas subordinat (Femia, 1981: 52). Selain itu, Gramsci memperkenalkan gagasan tentang "intelektual organik", yaitu aktor yang muncul dari suatu kelas sosial dan berfungsi untuk menyebarkan ideologi kelas tersebut. Bagi kelas dominan, intelektual organik adalah

agen penting untuk menjaga hegemoni, misalnya melalui pendidikan, media, dan lembaga kebudayaan. Namun, bagi kelas subordinat, intelektual organik dapat menjadi motor perlawanan ideologis, yaitu membangun kesadaran alternatif dan melawan dominasi kelas penguasa (Forgacs, 2000: 69). Dalam perkembangan teori sosial kontemporer, pemikiran Gramsci digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk dominasi budaya modern. Kapitalisme global, melalui media massa dan industri budaya, menanamkan nilai-nilai konsumerisme, individualisme, dan modernitas sehingga dianggap sebagai standar kehidupan. Nilai-nilai ini seringkali mendominasi hingga menggantikan norma-norma lokal. Di sinilah konsep hegemoni relevan untuk menganalisis bagaimana budaya global diterima tanpa perlawanan oleh masyarakat lokal (Storey, 2015: 70).

Berdasarkan realitas yang ada dan didasari atas analisis Gramsci terkait dengan Hegemoni. Selanjutnya, Gramsci menyebutkan terdapat tiga tingkatan dalam pembahasan terkait dengan Hegemoni, yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni yang merosot (*decadent*), dan hegemoni yang minimum.

#### a. Hegemoni Total

Hegemoni total adalah tingkat tertinggi, ketika kekuasaan kelas dominan benar-benar mampu meresap ke dalam kesadaran masyarakat secara luas. Pada tahap ini, masyarakat menunjukkan kesatuan moral dan intelektual yang kokoh sehingga nilai-nilai dominan diterima hampir tanpa pertanyaan. Hegemoni total dapat dilihat dalam masyarakat di mana ideologi dominan sudah menyatu dengan "akal sehat" (*common sense*). Artinya, masyarakat tidak lagi membedakan antara kepentingan kelas dominan dan kepentingan mereka sendiri, karena keduanya dianggap sama. Contohnya, dalam konteks kapitalisme modern, nilai seperti kerja keras, kompetisi, dan kesuksesan material diterima oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai sesuatu yang alami dan universal.

Ciri utama dari hegemoni total adalah stabilitas dan kohesi sosial yang tinggi. Perlawanan hampir tidak terlihat karena masyarakat percaya bahwa sistem yang ada adalah yang terbaik. Namun, meskipun tampak kuat, Gramsci menekankan bahwa hegemoni total tetap rapuh karena kondisi sosial-ekonomi selalu berubah (Gramsci, 1971: 181).

#### b. Hegemoni Minimum

Hegemoni minimum adalah tingkat terendah dari hegemoni, di mana kekuasaan tidak lagi memiliki legitimasi kuat di kalangan massa. Pada kondisi ini, dominasi hanya ditopang oleh kesatuan ideologis sempit di kalangan elit politik, ekonomi, dan intelektual.

Hegemoni minimum ditandai dengan berkurangnya dukungan luas dari masyarakat, sehingga penguasa lebih banyak bergantung pada aparat koersif seperti militer, polisi, dan hukum represif untuk mempertahankan stabilitas. Dalam situasi ini, ideologi dominan gagal membangun konsensus, sehingga perlawanan sosial dan politik lebih mudah muncul. Contoh nyata bisa ditemukan pada rezim otoriter, ketika kekuasaan lebih bertahan karena paksaan daripada persetujuan rakyat. Hegemoni minimum seringkali menjadi tanda awal dari runtuhnya sebuah sistem politik atau sosial, karena tidak lagi mampu mengikat masyarakat melalui kesadaran ideologis (Simon, 1991: 29).

### c. Hegemoni yang Merosot

Hegemoni yang merosot menunjukkan kondisi di mana dominasi masih berfungsi, tetapi mulai kehilangan kekuatan persuasifnya. Masyarakat tidak sepenuhnya meyakini ideologi dominan, meskipun mereka masih menaatinya dalam praktik sehari-hari. Dengan kata lain, terdapat potensi konflik tersembunyi yang sewaktu-waktu dapat memunculkan resistensi. Pada tahap ini, legitimasi kelas dominan mulai mengalami krisis. Nilai-nilai dominan masih dijalankan, tetapi tidak lagi diyakini sepenuh hati oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat cenderung "patuh secara formal", misalnya mengikuti aturan atau sistem karena kebutuhan praktis, bukan karena keyakinan ideologis.

Gramsci melihat kondisi ini sebagai fase yang rawan. Ia menyebutnya sebagai periode di mana kontra-hegemoni mulai tumbuh, terutama dari kelompok-kelompok sosial yang merasa tidak diakomodasi. Perlawanan ini bisa berwujud gerakan sosial, ideologi tandingan, hingga munculnya pemikiran alternatif yang menantang dominasi (Femia, 1981: 53).

Gramsci mengidentifikasi bentuk hegemoni yang merosot (*declining hegemony*) sebagai kondisi ketika nilai-nilai lama kehilangan legitimasi dan kekuatannya digantikan oleh nilai hegemonik baru, namun belum sepenuhnya digantikan oleh bentuk dominasi yang stabil (Laclau & Mouffe, 1985 : 22). Dalam konteks degradasi upacara adat, hal ini ditandai dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam upacara tradisional, pemaknaan yang memudar, hingga pengabaian praktik adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa upacara adat tidak lagi memegang posisi hegemonik dalam struktur sosial-budaya lokal, karena telah tergeser oleh sistem nilai dominan seperti modernisme, kapitalisme, atau agama mayoritas. Maka, degradasi ini dapat dikategorikan dalam hegemoni merosot, yaitu saat kekuasaan budaya lokal melemah di bawah tekanan hegemoni baru yang lebih dominan (Barker, 2004: 37).

#### 2.1.2 Degradasi

Secara etimologi degradasi berasal dari bahasa Inggris *Decadence* yang berarti penurunan, dan dalam bahasa Indonesia degradasi artinya kemunduran, kemerosotan, kesenian, adat istiadat (Daud, 2011: 353-354). Merujuk arti degradasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), degradasi berarti kemunduran, kemerosotan, pengikisan atau penurunan dalam suatu hal.

Degradasi ialah bentuk dari adanya penurunan atau memudarnya nilai-nilai budaya pada suatu kelompok di lingkungan masyarakat yang akan melahirkan budaya baru seperti konsumerisme, materialistis, individualistis, dan hedonisme (Resmiwati, 2010 : 15-23). Degradasi dapat terjadi di beberapa di masyarakat dan bermacam-macam bentuknya, seperti degradasi moral, degradasi lahan, dan degradasi budaya yang dapat terjadi akibat pengaruh perubahan sosial dan modernisasi.

Jika dikaitkan dengan hukum adat, degradasi adat dapat diartikan sebagai menurunnya fungsi dan kewenangan hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Gejala ini tampak dalam berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap norma adat, melemahnya posisi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa, serta mulai hilangnya kearifan lokal yang selama ini berfungsi menjaga

keseimbangan sosial dan lingkungan. Owino (2016: 1) menegaskan bahwa sejak masa kolonialisme, hukum adat mulai mengalami degradasi karena tergeser oleh hukum Barat, sehingga keberadaannya hanya dianggap sebagai hukum sekunder.

Ahrdn (2004: 2) menambahkan bahwa degradasi adat tidak hanya terjadi karena faktor eksternal, tetapi juga karena adanya penolakan dan kurangnya pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Dalam beberapa kasus, hukum adat dianggap kuno atau tidak sesuai dengan kebutuhan modern, sehingga generasi muda cenderung meninggalkan norma-norma adat.

Secara sosiologis, degradasi adat menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat. Dari yang semula berorientasi komunal, perlahan bergeser ke pola pikir individualistik yang lebih menekankan kepentingan pribadi. Qing (2006: 1) menegaskan bahwa hukum adat berada pada titik persimpangan: bertahan dengan nilai lama atau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini akan mempercepat proses degradasi adat.

Menurut Antonio Gramsci, degradasi dapat dipahami sebagai bentuk kemerosotan kesadaran kritis masyarakat akibat dominasi ideologis yang dilakukan oleh kelas penguasa. Meskipun istilah “degradasi” tidak disebutkan secara langsung dalam karya-karyanya, konsep ini dapat ditelusuri melalui gagasan Gramsci tentang hegemoni. Hegemoni, menurut Gramsci, merupakan bentuk kekuasaan yang dipertahankan bukan hanya melalui paksaan (*coercion*), tetapi juga melalui persetujuan (*consent*) yang dibentuk melalui institusi budaya, pendidikan, agama, dan media massa (Gramsci, 1971: 12). Dalam konteks ini, masyarakat kelas bawah secara tidak sadar menerima nilai-nilai dan pandangan dunia kelas penguasa sebagai sesuatu yang alamiah dan sah, sehingga melemahkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis serta melawan ketidakadilan struktural. Proses ini menggambarkan terjadinya degradasi moral dan intelektual dalam masyarakat, di mana kesadaran kritis tergantikan oleh kepasrahan terhadap dominasi ideologis yang mapan (Gramsci, 1971: 333). Gramsci menyebut keadaan ini sebagai “krisis moral dan intelektual,” yaitu saat tatanan sosial lama mulai runtuh, namun belum muncul kekuatan baru yang mampu menawarkan arah sosial dan politik yang lebih progresif (Gramsci, 1971: 276).

### **2.1.3 Faktor- Faktor Terjadinya Degradasi Adat**

Menurut teori hegemoni Antonio Gramsci, degradasi adat (melemahnya atau hilangnya adat dan tradisi lokal) dapat dipahami sebagai hasil dari dominasi ideologis kelompok tertentu atas kelompok lain. Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni tidak hanya terjadi melalui kekuatan fisik atau paksaan, tetapi terutama melalui persetujuan (*consent*) yang dibentuk lewat ideologi, pendidikan, media, dan budaya. Faktor-Faktor Terjadinya Degradasi Adat Menurut Teori Hegemoni Gramsci:

#### **a. Dominasi Budaya Modern atau Global**

Budaya modern dan global hadir dengan simbol-simbol kemajuan: teknologi, gaya hidup urban, rasionalitas, dan nilai kebebasan individu. Gramsci menyebut bahwa dominasi ideologi terjadi ketika kelompok dominan berhasil membingkai budayanya sebagai sesuatu yang wajar dan universal. Dalam konteks adat, budaya modern sering dianggap lebih “maju” dan “rasional” dibanding adat

yang dianggap penuh takhayul atau membatasi kebebasan. Lama-kelamaan, masyarakat sendiri mulai meninggalkan adat karena malu dianggap kuno (Gramsci, 1971: 17).

b. Pendidikan Formal yang Berorientasi Nasional atau Barat

Pendidikan bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga arena reproduksi ideologi. Gramsci menekankan bahwa sekolah adalah instrumen hegemonik yang membentuk kesadaran kolektif sesuai kepentingan kelas atau kelompok dominan. Dalam banyak kurikulum, pengetahuan lokal hanya jadi pelengkap, sementara sejarah nasional atau filsafat Barat dijadikan standar. Hal ini membentuk pandangan bahwa adat hanyalah “pengetahuan kampung” yang tidak penting untuk masa depan. Akibatnya, generasi muda lebih menghargai gelar akademik formal daripada kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Proses ini mempercepat terputusnya transmisi adat (Gramsci, 1971: 350).

c. Peran Negara sebagai Pengusung Ideologi Dominan

Negara memiliki peran strategis dalam menguatkan hegemoni. Gramsci menyebut negara sebagai gabungan “aparatus koersif” (polisi, tentara) dan “aparatus ideologis” (pendidikan, hukum, birokrasi). Negara modern cenderung menyeragamkan aturan melalui hukum positif dan kebijakan pembangunan. Hukum adat sering dipandang tidak efisien, tidak adil, atau bertentangan dengan hukum nasional. Akibatnya, lembaga adat kehilangan otoritas sosialnya (Gramsci, 1971: 258).

d. Ekonomi Kapitalis dan Komodifikasi Budaya

Kapitalisme tidak hanya menguasai ranah ekonomi, tetapi juga budaya. Gramsci menjelaskan bahwa kelas dominan mempertahankan hegemoni dengan mengontrol basis ekonomi sekaligus kesadaran masyarakat. Dalam konteks adat, kapitalisme mengubah nilai budaya menjadi komoditas. Ritual adat yang sakral dijadikan pertunjukan untuk turis, pakaian adat dijual sebagai souvenir, dan seni tradisi diproduksi massal untuk pasar. Dampaknya, makna asli adat hilang. Yang tersisa hanyalah bentuk luar yang bisa dipasarkan. Adat tidak lagi menjadi sumber nilai hidup, melainkan sumber uang (Gramsci, 1971: 377).

e. Internalisasi Nilai Dominan oleh Masyarakat Adat Sendiri

Hegemoni paling efektif bukan lewat paksaan, tetapi lewat penerimaan sukarela (consent). Masyarakat yang terdominasi mulai menganggap ideologi dominan sebagai sesuatu yang benar. Dalam hal adat, masyarakat sendiri mulai menilai aturan adat sebagai beban. Misalnya, kewajiban gotong royong dianggap mengganggu kesibukan kerja modern. Mereka lalu mengganti nilai kolektif dengan nilai individualis dan materialistis. Akibatnya, adat melemah bukan karena dilarang, tetapi karena ditinggalkan oleh pemiliknya sendiri. Inilah bentuk dominasi halus yang digambarkan Gramsci (Gramsci, 1971: 244).

f. Fragmentasi Sosial dan Generasi

Adat biasanya diwariskan melalui kebersamaan lintas generasi. Namun, ketika generasi muda sudah terikat pada nilai dominan, terjadi jurang pemisah dengan generasi tua. Gramsci menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam mempertahankan sebuah budaya. Ketika kesadaran kolektif ini pecah karena penetrasi ideologi dominan, maka adat kehilangan basis sosialnya. Fragmentasi ini

menyebabkan adat hanya dijalankan oleh sebagian kecil kelompok (biasanya generasi tua), sementara generasi muda lebih memilih meninggalkannya. Lambat laun, adat tinggal simbol atau formalitas, tidak lagi hidup dalam praktik sehari-hari (Gramsci, 1971: 333).

#### **2.1.4 Dampak yang Ditimbulkan dari Degradasi Adat**

Degradasi adat merupakan fenomena sosial-budaya yang ditandai oleh melemahnya nilai, norma, dan praktik adat akibat pengaruh eksternal seperti modernisasi, globalisasi, dan kebijakan negara. Dalam konteks teori sosial, fenomena ini dapat dipahami melalui teori hegemoni Antonio Gramsci, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya melalui paksaan (*coercion*), tetapi juga melalui konsensus ideologis yang membuat kelompok subordinat menerima dominasi sebagai sesuatu yang wajar (Gramsci, 1971: 12). Dengan demikian, degradasi adat mencerminkan keberhasilan ideologi dominan dalam menanamkan nilai-nilai baru yang menggantikan sistem makna tradisional masyarakat adat.

Melalui lensa Gramsci, adat dipandang bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran kolektif dan alat resistensi terhadap kekuasaan hegemonik. Ketika adat mengalami degradasi, maka yang terjadi bukan sekadar hilangnya praktik budaya, melainkan juga disintegrasi ideologis yang melemahkan potensi masyarakat lokal untuk menegosiasikan identitas dan kekuasaannya sendiri di tengah tekanan global (Suwandi, 2021: 45). Berdasarkan pemikiran tersebut, berikut merupakan berbagai dampak yang ditimbulkan dari degradasi adat menurut perspektif teori hegemoni Gramsci, yang mencakup dimensi dominasi budaya, marginalisasi sosial, penetrasi nilai modernitas, serta munculnya bentuk-bentuk resistensi atau kontra-hegemoni dalam masyarakat adat.

##### **a. Hegemoni sebagai Alat Dominasi Budaya**

Menurut Gramsci, hegemoni adalah cara kelas dominan mempertahankan kekuasaan dengan menjadikan ideologi mereka sebagai norma umum yang diterima oleh seluruh masyarakat (Gramsci, 1971: 56). Dalam konteks masyarakat adat, hegemoni bekerja melalui pendidikan, media, dan kebijakan negara yang menanamkan nilai-nilai modernitas, efisiensi ekonomi, dan kemajuan teknologi sebagai ukuran peradaban (Suwandi, 2021: 48). Nilai-nilai ini secara perlahan menggantikan prinsip kolektivitas, keseimbangan ekologis, dan spiritualitas yang menjadi dasar sistem adat. Dominasi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat bekerja tanpa paksaan langsung, melainkan melalui internalisasi nilai hegemonik ke dalam kesadaran masyarakat adat (Suwandi, 2021: 50).

Dampaknya, masyarakat adat mulai memandang nilai-nilai modern sebagai sesuatu yang lebih tinggi dan rasional dibandingkan nilai tradisional mereka. Ketika adat dianggap kuno atau tidak produktif, masyarakat secara perlahan kehilangan kepercayaan diri terhadap identitas budayanya sendiri. Proses ini menandakan keberhasilan hegemoni dalam mengikis basis resistensi budaya melalui mekanisme ideologis yang halus namun efektif (Rizal, 2018: 27).

##### **b. Degradasi Adat dan Marginalisasi Sosial**

Degradasi adat sering kali disertai dengan marginalisasi sosial, ekonomi, dan politik. Ketika sistem adat dilemahkan, struktur otoritas tradisional kehilangan

legitimasi untuk mengatur tanah, sumber daya, dan tata sosial. Akibatnya, masyarakat adat menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi oleh kekuatan eksternal, terutama korporasi dan kebijakan pembangunan yang berorientasi kapitalistik (Hidayat & Rahman, 2020: 33). Dengan demikian, degradasi budaya tidak hanya berdampak pada identitas simbolik, tetapi juga pada ketidakadilan struktural yang memperlebar jarak antara kelompok adat dan kelas dominan (Hidayat & Rahman, 2020: 36).

Lebih lanjut, marginalisasi ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang semakin memperkuat dominasi hegemonik. Ketika masyarakat adat kehilangan kemandirian dan sumber daya, mereka dipaksa menyesuaikan diri dengan logika pasar dan sistem ekonomi global. Dalam kerangka Gramsci, kondisi ini menggambarkan bagaimana hegemoni beroperasi bukan hanya melalui ideologi, tetapi juga melalui struktur ekonomi dan politik yang menindas (Hidayat & Rahman, 2020: 38).

#### c. Pengaruh Hegemoni Modernitas terhadap Nilai Budaya Lokal

Modernitas membawa paradigma baru yang memandang kemajuan material dan rasionalitas sebagai ukuran keberhasilan masyarakat. Melalui media, pendidikan, dan wacana pembangunan, nilai-nilai modern ini menyusup ke dalam kesadaran masyarakat adat dan menggantikan nilai-nilai lokal yang berbasis spiritualitas dan keseimbangan ekologis (Rizal, 2018: 22). Akibatnya, adat mulai direduksi menjadi simbol budaya yang bersifat dekoratif tanpa kekuatan sosial dan moral seperti sebelumnya (Rizal, 2018: 24).

Proses ini menimbulkan bentuk asimilasi ideologis, di mana masyarakat adat menerima nilai-nilai luar tanpa menyadari bahwa hal itu mengikis otonomi budaya mereka sendiri. Dalam jangka panjang, masyarakat adat hidup dalam dua dunia: satu yang mempertahankan adat sebagai warisan simbolik, dan satu lagi yang menyesuaikan diri dengan modernitas sebagai realitas sosial (Rizal, 2018: 26). Fenomena ini disebut Gramsci sebagai bentuk “persetujuan kultural”, di mana dominasi diterima secara sukarela karena dianggap membawa kemajuan (Gramsci, 1971: 189).

#### d. Resistensi Budaya dan Kontra-Hegemoni

Meskipun hegemoni bersifat kuat dan meluas, Gramsci menegaskan bahwa selalu ada ruang bagi kontra-hegemoni, yakni upaya kelompok subordinat untuk membangun kesadaran kritis dan menantang dominasi ideologis (Gramsci, 1971: 210). Dalam konteks degradasi adat, bentuk kontra-hegemoni muncul melalui gerakan revitalisasi budaya, pendidikan adat, dan perlawanan terhadap proyek kapitalistik yang merusak lingkungan hidup (Fitriani, 2022: 41). Upaya ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga alat politik untuk menegaskan eksistensi dan kedaulatan masyarakat adat di masa kini (Fitriani, 2022: 44).

Selain itu, resistensi budaya berperan penting dalam membangun kembali kesadaran kolektif dan solidaritas sosial. Melalui ritual, pendidikan lokal, dan penguatan organisasi adat, masyarakat mampu menciptakan ruang alternatif yang menolak dominasi simbolik modernitas. Dalam kerangka Gramsci, tindakan ini merupakan bentuk praksis intelektual organik—proses di mana kelompok tertindas

menciptakan kesadaran baru untuk melawan tatanan hegemonik yang mapan (Fitriani, 2022: 47).

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan diperlukan untuk memperkuat landasan ilmiah serta menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya yang memiliki tema serupa. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh berbagai penelitian yang relevan dengan objek kajian dalam tulisan ini, diperoleh sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil-hasil penelitian yang relevan tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Hasbi, dkk (2016) yang berjudul “Perubahan dan upacara tradisional Indonesia: Kajian kes ‘*Rambu Solo* dulu dan kini di Makale Utara Tana Toraja, Sulawesi”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan pelaksanaan upacara *Rambu Solo* dari masa lalu hingga masa kini di Makale Utara, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan makna upacara *Rambu Solo* dari dulu hingga sekarang telah memunculkan tiga bentuk motif perilaku, yaitu motif status sosial yang cenderung ingin menunjukkan prestise, motif ekonomi, dan motif budaya. Hasil penelitian ini menyarankan kepada tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk meningkatkan pelatihan guna menyadarkan masyarakat Toraja agar meninggalkan perilaku berdasarkan motif-motif tersebut, terutama motif untuk menunjukkan prestise, demi menjaga keaslian makna dari ritual ini. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu upacara adat *Rambu Solo*. Keduanya sama-sama menyoroti perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan ritual tersebut sebagai bagian dari dinamika sosial budaya masyarakat Toraja. sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan teori dan fokus analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh hasbi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tanpa landasan teori kritis tertentu. Analisisnya berfokus pada perubahan bentuk, makna, dan motif pelaksanaan upacara *Rambu Solo* dari masa lalu hingga masa kini, dengan menyoroti motif sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Toraja dalam menjalankan ritual tersebut, sedangkan penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai landasan analisis untuk menelaah proses degradasi adat *Rambu Solo*. Fokusnya bukan hanya pada perubahan bentuk atau motif, melainkan pada mekanisme dominasi ideologis dan kultural yang menyebabkan melemahnya nilai-nilai tradisional akibat pengaruh modernitas, kapitalisme, dan globalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kondongan (2019) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara *Rambu Solo* berdasarkan Tingkatan Masyarakat (Studi Kasus Makale Kabupaten Tana Toraja)”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap upacara *Rambu Solo* berdasarkan Tingkatan Masyarakat, mengidentifikasi status sosial dalam upacara *Rambu Solo*, dan memahami kandungan nilai religius dalam upacara *Rambu Solo* di Makale Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa persepsi masyarakat Toraja melaksanakan upacara *Rambu Solo* sebagai bakti penghormatan terakhir serta wujud kasih sayang pada orang-tua dan untuk menaikkan status dengan mempertahankan prestise, harga diri dalam masyarakat sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah pemborosan. Sedangkan Status sosial seseorang dalam upacara *Rambu Solo* dapat dilihat dari jenis pesta kematian, seberapa lama pelaksanaan upacara berlangsung,

berapa jumlah hewan yang dikurbankan, sampai pada simbol-simbol yang dipakai dalam upacara yang dapat menunjukkan strata seseorang yang meninggal. Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu upacara adat *Rambu Solo* di Tana Toraja. Keduanya sama-sama menyoroti praktik dan makna sosial yang terkandung dalam pelaksanaan upacara kematian tersebut sebagai bagian penting dari sistem budaya masyarakat Toraja. Baik penelitian Kondongan maupun penelitian ini sama-sama melihat *Rambu Solo* sebagai representasi nilai, norma, dan identitas sosial masyarakat Toraja yang terus mengalami dinamika dalam konteks sosialnya, sedangkan perbedaannya terletak pada segi teori dan analisis yang digunakan. Penelitian Kondongan menggunakan pendekatan sosiologis deskriptif dengan fokus pada persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan upacara *Rambu Solo* berdasarkan tingkatan sosial, serta makna religius dan status sosial yang melekat dalam tradisi tersebut. Sementara itu, penelitian ini menganalisis degradasi adat *Rambu Solo* dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, penelitian berupaya menelusuri bagaimana kekuatan ideologis dan dominasi budaya modern menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, makna, dan praktik adat dalam upacara *Rambu Solo*, sehingga adat tersebut mengalami proses hegemoni dan degradasi kultural dalam kehidupan masyarakat Toraja masa kini.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Embon (2019) yang berjudul "Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja *Rambu Solo*". Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan simbol-simbol dalam upacara adat Toraja *Rambu Solo*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa simbol-simbol yang terdapat dalam upacara *Rambu Solo* terdiri dari simbol verbal dan simbol nonverbal. Adapun simbol verbal yang terdapat dalam upacara adat *Rambu Solo* adalah berupa doa-doa yang diucapkan oleh *To Minaa* yang bermakna sebagai pemujaan, permohonan, dan untuk pengagungan. Sedangkan simbol nonverbal berupa alat-alat sebagai perlengkapan upacara yang bermakna sebagai persembahan kepada para leluhur serta penghormatan terakhir bagi almarhum dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Persamaannya terletak pada objek kajian, yakni sama-sama meneliti upacara adat *Rambu Solo* di masyarakat Toraja. Kedua penelitian ini berupaya memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pelaksanaan upacara *Rambu Solo* sebagai bentuk warisan adat yang sarat makna religius dan sosial, sedangkan perbedaannya terletak pada segi teori dan analisis yang digunakan. Penelitian Embon menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada sistem simbol dalam upacara adat *Rambu Solo*, baik simbol verbal berupa doa-doa yang diucapkan oleh *To Minaa* maupun simbol nonverbal berupa perlengkapan dan benda-benda ritual yang memiliki makna persembahan dan penghormatan. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menganalisis degradasi adat *Rambu Solo*, dengan menelaah bagaimana kekuatan ideologi dan dominasi budaya modern memengaruhi perubahan makna dan pelaksanaan upacara tersebut.

Penelitian Anggraeni & Putri (2020) yang berjudul "Makna Upacara Adat Pemakaman *Rambu Solo* di Tana Toraja". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan simbol apa saja yang terkandung dalam upacara adat pemakaman *Rambu Solo* serta keterkaitannya terhadap relasi antara Tuhan dengan

manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa penting upacara adat pemakaman *Rambu Solo* bagi masyarakat Tana Toraja dalam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa hasil penggunaan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat suku Toraja memiliki anggapan bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut juga sebagai suatu bentuk penghormatan kepada arwah para leluhur mereka yang dahulu telah menjaga alamnya dengan baik. Toraja juga dikenal memiliki banyak kebudayaan di dalamnya. Kebudayaan tersebut tercipta sejak dahulu oleh para leluhur hingga saat ini dan menjadi kebudayaan turun-temurun yang masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Toraja. Bentuk kebudayaan yang terkenal di Toraja salah satunya adalah tradisi upacara adat. Masyarakat Tana Toraja memiliki pandangan bahwa kematian sebagai berpindahnya jiwa seseorang yang telah meninggal dunia menuju ke tempat yang lebih baik yaitu alam roh. Alam roh yang dimaksud adalah kembali pada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan yang bernama *Puya*. Upacara adat pemakaman *Rambu Solo* dapat dikatakan sebagai kegiatan pelaksanaan ritual yang sangat penting dan berbiaya tinggi. Karena dengan adanya aturan pelaksanaan upacara yang disesuaikan dengan strata sosial, maka dapat memberikan ciri-ciri yang khas pada pelaksanaan upacara adat pemakaman *Rambu Solo* ini. Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti upacara adat pemakaman *Rambu Solo* di Tana Toraja. Kedua penelitian ini menyoroti *Rambu Solo* sebagai salah satu bentuk kebudayaan penting masyarakat Toraja yang sarat akan nilai religius, sosial, dan filosofis, Sedangkan perbedaannya terletak pada segi teori dan analisis. Penelitian Anggraeni & Putri menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan berfokus pada makna simbolik serta nilai religius dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo*, khususnya dalam konteks hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pemaknaan spiritual dan filosofis yang terkandung dalam tradisi *Rambu Solo* sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menganalisis degradasi adat *Rambu Solo*. Fokusnya bukan hanya pada makna simbolik, tetapi pada proses pergeseran nilai dan praktik budaya akibat dominasi ideologi modern dan perubahan sosial. Melalui perspektif hegemoni, penelitian ini menelaah bagaimana kekuatan budaya luar dan sistem sosial yang berubah telah memengaruhi pelaksanaan *Rambu Solo*, sehingga terjadi penurunan makna, penyimpangan nilai adat, dan munculnya bentuk-bentuk kompromi budaya yang mencerminkan degradasi tradisi dalam masyarakat Toraja masa kini.

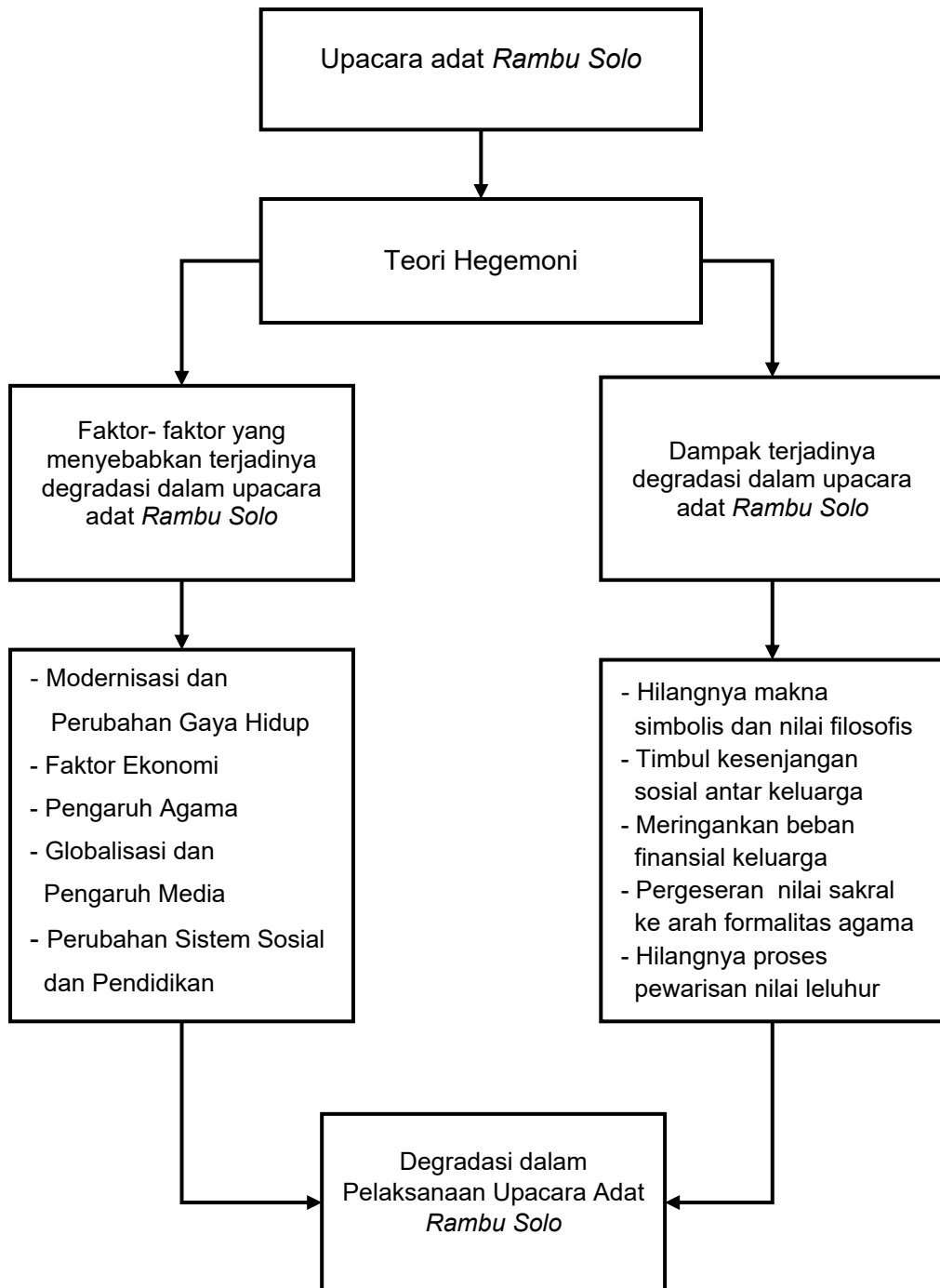
Penelitian yang dilakukan oleh Paganggi dkk (2021) yang berjudul "Pergeseran Makna Dalam Pelaksanaan Upacara Adat *Rambu Solo* Pada Masyarakat Toraja". Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bentuk pergeseran makna atau nilai yang terjadi dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo* dan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung terjadinya pergeseran makna dan nilai dalam pelaksanaan upacara *Rambu Solo* pada masyarakat Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai atau makna yang menjadi dasar dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo* mengalami pergeseran. Hal ini disebabkan oleh adanya kegengsian

masyarakat Toraja akibat kehadiran modernisasi kemudian didukung oleh faktor-faktor internal dari masyarakat Toraja sendiri serta faktor eksternal dari luar masyarakat Toraja. Faktor yang paling berpengaruh dalam pergeseran makna atau nilai tersebut adalah rasionalitas kepercayaan atau faktor agama. Kehadiran agama inilah yang mampu mengikis kepercayaan masyarakat Toraja terhadap banyak hal yang ditanamkan pada sistem tata aturan *Aluk Todolo* atau alukta. Akibatnya, pelaksanaan upacara adat inipun sudah tidak lagi sama dengan sebelumnya. Perubahan tersebut merupakan bentuk perubahan yang tidak dikehendaki, dimana masyarakat Langda pada dasarnya tidak menginginkan perubahan tersebut namun tak bisa mengelak dari perkembangan zaman atau modernisasi. Persamaannya terletak pada objek kajian, yakni sama-sama meneliti upacara adat *Rambu Solo* pada masyarakat Toraja. Kedua penelitian tersebut berangkat dari perhatian yang sama terhadap dinamika sosial dan budaya yang terjadi dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo*, yang merupakan salah satu warisan budaya paling penting dan sakral bagi masyarakat Toraja, sedangkan perbedaannya terletak pada segi teori dan analisis yang digunakan. Penelitian Paganggi dkk (2021) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan berfokus pada pergeseran makna dan nilai dalam upacara *Rambu Solo*, serta faktor-faktor penyebabnya seperti modernisasi, perubahan kepercayaan, dan pengaruh agama. Penelitian tersebut menekankan bahwa perubahan makna yang terjadi merupakan akibat dari benturan antara nilai-nilai tradisional Aluk Todolo dengan ideologi modern dan rasionalitas agama yang mulai mengikis kepercayaan masyarakat terhadap aturan adat. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menganalisis degradasi adat *Rambu Solo*, dengan menyoroti bagaimana kekuatan ideologis dan dominasi budaya modern menyebabkan terjadinya penurunan atau pelemahan nilai-nilai adat dalam praktik upacara tersebut. Melalui perspektif hegemoni, penelitian ini tidak hanya melihat pergeseran makna sebagai akibat dari perubahan sosial, tetapi juga sebagai bentuk proses hegemonik, di mana masyarakat secara tidak sadar menerima ideologi dominan yang melemahkan posisi adat sebagai kekuatan budaya lokal.

### **2.3 Kerangka Pikir**

Menurut Sugiyono (2013: 60), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. *Rambu Solo* merupakan sebuah upacara pemakaman secara adat yang telah diwarisi oleh masyarakat suku Toraja secara turunturun. Upacara *Rambu Solo* ini bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal menuju tempat peristirahatan terakhir yang disebut dengan *puya*.

Oleh karena itu, kerangka pikir penelitian ini menggunakan objek Upacara adat *Rambu Solo* dengan pendekatan teori hegemoni untuk melihat faktor apa saja yang menimbulkan degradasi nilai, makna, dan fungsi dari ritual adat yang semula sakral menjadi lebih bersifat simbolik dan seremonial semata, Serta dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut tergambarkan pada uraian skema kerangka pikir berikut ini.

**Bagan Kerangka Pikir :**

#### **2.4 Definisi Operasional**

1. Degradasi adalah suatu penurunan atau memudarnya nilai- nilai yang terkandung dalam suatu budaya pada kelompok masyarakat.
2. Hegemoni adalah bentuk dominasi ideologi dan kepemimpinan budaya oleh kelompok tertentu yang diterima secara sukarela oleh masyarakat tanpa paksaan langsung.
3. *Rambu Solo* adalah upacara adat pemakaman masyarakat Toraja yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia.